



UNIFEM adalah dana pembangunan untuk perempuan Perserikatan Bangsa Bangsa. UNIFEM menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi program dan strategi inovatif yang memperjuangkan hak asasi, partisipasi politik, dan ketahanan ekonomi perempuan. UNIFEM bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang bernaung di bawah lembaga PBB, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (ornop) serta jaringan-jaringan yang memperjuangkan kesetaraan gender. UNIFEM mengkaitkan isu dan permasalahan perempuan dengan agenda nasional, regional maupun global, melalui kerjasama dan bantuan teknis keahlian bagi strategi pengarus-utamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Publikasi ini dimungkinkan melalui kerjasama dan dukungan dari GTZ, khususnya proyek "Penguatan Hak-hak Perempuan" atas nama Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development/BMZ).

Ditulis oleh Lee Waldorf, *research* oleh Shelley Inglis

Ucapan terima kasih kepada:  
sejumlah individu yang telah memberikan saran dan dukungan yang sangat berarti dalam proses publikasi ini, dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih atas semua kontribusi yang sudah diberikan, yaitu kepada Barbara Adams, Carol Barton, Mara Bustelo, Nanette Braun, Noeleen Heyzer, Chandni Joshi, Osnat Lubrani, Zina Mounia, Juliane Osterhaus, Leigh Pasqual, Joanne Sandler, Hanna Beate Schoepp-Schilling dan Damira Sartbaeva.

Jalan Menuju Kesetaraan Gender: CEDAW, Beijing dan MDG  
Copyright ©

**Judul Asli adalah "Pathway to Gender Equality"**

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia, penyuntingan dan publikasi dimungkinkan dengan izin dari UNIFEM CEDAW South-East Asia Programme dan didukung dana dari Canadian International Development Agency (CIDA).  
Diterjemahkan pertama kali oleh Netti Lesmanawati dan disunting untuk publikasi oleh Achie S. Luhulima, Jakarta, Juni 2007

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
Agenda Kesetaraan Gender Milenium .....	5
Melaksanakan MDG untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender .....	9
Keterkaitan Tujuan Pembangunan Milenium dengan CEDAW dan Beijing .....	12
Tujuan 1 .....	14
Tujuan 2 .....	18
Tujuan 3 .....	22
Tujuan 4 dan 5 .....	26
Tujuan 6 .....	30
Tujuan 7 .....	34
Tujuan 8 .....	38
Sumber-sumber Elektronik .....	42....
Bibliografi .....	43

Deklarasi Milenium dan MDG (Millennium Development Goals=Tujuan Pembangunan Milenium) telah membuka pintu baru bagi kemajuan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Dengan memanfaatkan potensi terbaiknya, kedua hal ini dapat menjadi sarana yang memperlihatkan dengan jelas hubungan yang tersembunyi dan menghancurkan antara ketidak-setaraan gender, penyalahgunaan dan penghancuran potensi kemanusiaan perempuan, dan kemiskinan yang berlarut-larut, dan kemudian dapat diatasi.

Sebagaimana diakui dalam Deklarasi Milenium, pengurangan tingkat kemiskinan yang berarti dan berkesinambungan tergantung pada kemauan kita untuk menghadapi kenyataan bahwa setengah dari penduduk dunia, anak-anak perempuan dan perempuan dewasa, telah secara sistematis direndahkan dan dirugikan. Dan dengan komitmen yang tak kunjung padam kami mengambil langkah-langkah kongkret untuk menghapus ketidak-setaraan ini.

Karena telah menjadi titik pusat dari suatu agenda bersama yang dianut oleh semua mitra pembangunan, termasuk masyarakat pemberi bantuan pembangunan, MDG merupakan sarana yang efektif untuk melakukan perubahan. Tetapi yang lebih penting daripada konvergensi agenda pembangunan ini adalah timbulnya konsensus bahwa upaya-upaya untuk mencapai MDG harus terus menerus diilhami oleh visi yang ditentukan dalam Deklarasi Milenium. Meskipun ditentukan pencapaian tujuan dengan target dan indikator tertentu untuk mengurangi kemiskinan, MDG hanya dapat memberikan rentang dan garis besar pekerjaan yang harus dilakukan. Deklarasi Milenium merupakan dan harus menjadi panduan bagi kita untuk membawa MDG ke kehidupan nyata – dan apa yang ditetapkan dalam Deklarasi adalah bahwa upaya-upaya untuk mengimplementasikan komitmen yang dideklarasikan melalui hasil-hasil konferensi dunia yang menjadi hukum internasional dengan standar hak asasi manusia, harus dinaikkan ke tahap yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

Deklarasi Milenium juga mengarahkan kita memenuhi kebutuhan mendesak untuk melakukan pendekatan-pendekatan holistik yang terpadu guna mengurangi kemiskinan. Keprihatinan-keprihatinan tertentu – seperti mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, memerangi HIV/AIDS dan mengembangkan kemitraan global bagi pembangunan – begitu kritis sehingga diperlakukan sebagai Tujuan MDG yang berdiri sendiri.

Tetapi hal tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian dari kebutuhan untuk memperhatikan dimensi ini dalam setiap prakarsa yang ditujukan untuk mencapai MDG. Wabah HIV/AIDS secara serius mengancam pencapaian Tujuan- MDG lainnya. Bila kerjasama pembangunan tidak secara jelas dikaitkan untuk mendukung pencapaian semua MDG, upaya-upaya di tingkat nasional bisa jadi sia-sia.

Sebagaimana dirinci dalam buku kecil ini, ketidak-setaraan gender sangat terkait dengan setiap tantangan pembangunan yang ingin diatasi dengan MDG.

Buku kecil ini juga menggaris-bawahi bahwa Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing harus menjadi batu ujian kita untuk mewujudkan potensi yang ada dalam MDG. Kekayaan pemahaman dan pengalaman tentang sifat diskriminasi berbasis gender dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender telah dimunculkan lewat proses-proses CEDAW dan Beijing dan perlu diwujudkan. Dengan menggunakan CEDAW dan Beijing sebagai lensa untuk memahami dan mengimplementasikan MDG, keyakinan yang kuat dan pembangunan yang efektif dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan lebih baik.

Visi yang diartikulasikan dalam Deklarasi Milenium inilah yang sepenuhnya dipikul bersama oleh Dana Pembangunan untuk Perempuan PBB (UNIFEM) dan Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Federal Jerman (BMZ). BMZ menyadari arti penting untuk mewujudkan hak asasi perempuan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri dan sebagai sarana penting dari pencapaian pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. UNIFEM telah menetapkan perwujudan hak asasi perempuan hingga kesetaraan dan keadilan gender sebagai kerangka kerja yang menaungi dan sebagai tujuan utama dari semua sektor yang dikerjakan – dari pemberdayaan ekonomi, ke pembangunan perdamaian, serta memerangi wabah HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan. UNIFEM dan BMZ berharap bahwa sumberdaya ini akan menjadi sumbangan penting pada pekerjaan yang kita kerjakan, bersama-sama dengan para pendukung kesetaraan gender di seluruh dunia, untuk mewujudkan janji Deklarasi Milenium.

## **CEDAW**

- Menjamin adanya kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintah mereka di tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam kerja organisasi-organisasi internasional (pasal 8)
- Memastikan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah dan untuk memangku jabatan publik serta mengemban fungsi publik di semua tingkatan pemerintahan (pasal 7.b)
- Memastikan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berhubungan dengan kehidupan publik dan politik negara (pasal 7.c)
- Memastikan hak perempuan pedesaan untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di semua tingkatan (pasal 14.2.a)

## **BPFA**

- Menelaah, mengadopsi dan mempertahankan kebijakan-kebijakan makroekonomi dan strategi-strategi pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan upaya perempuan yang hidup dalam kemiskinan (sasaran strategis A.1)
- Melaksanakan langkah-tindak untuk menjamin akses perempuan yang setara untuk berpartisipasi penuh dalam tata kekuasaan dan pengambilan-keputusan (sasaran strategis G.1)

# Agenda Milenium Kesetaraan Gender

*Millennium Development Goals* (Tujuan Pembangunan Milenium=MDG) lahir dari **Deklarasi Milenium** – suatu konsensus global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang disepakati pada tahun 2000 oleh 189 Negara Anggota PBB. Dalam Deklarasi ini negara-negara tersebut secara bersama-sama mengedepankan visi global bagi perbaikan kondisi kemanusiaan di seluruh dunia di bidang-bidang pembangunan dan pengurangan kemiskinan, perdamaian dan keamanan, perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia dan demokrasi.

Kebutuhan mutlak untuk memajukan hak asasi manusia dari seluruh umat manusia agar mencapai visi ini ditegaskan dalam Deklarasi. Secara khusus, pemajuan hak perempuan hingga kesetaraan gender diakui sebagai sangat perlu bagi kemajuan. Deklarasi menyatakan secara tegas 'untuk memerangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk mengimplementasikan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)'. Lebih lanjut diakui arti penting mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai jalan yang efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan dan penyakit dan untuk merangsang pembangunan yang benar-benar berkelanjutan.

Pada saat yang sama, Deklarasi Milenium menegaskan kembali peran sentral kesetaraan gender dari perspektif Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing (1995) dan konferensi-konferensi dunia lainnya seperti Konferensi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (1992), Konferensi Wina tentang Hak Asasi Manusia (1993), Konferensi Kairo tentang Kependudukan dan Pembangunan (1994), Pertemuan Puncak Dunia tentang Pembangunan Sosial di Kopenhagen (1995) dan Konferensi Istanbul tentang Pemukiman Manusia (1996). Konferensi-konferensi dunia yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 1990-an ini merupakan pemacu bagi masyarakat internasional untuk bertemu di Pertemuan Puncak Milenium tahun 2000, dan menyetujui langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dan Deklarasi Milenium memperbarui komitmen yang telah dinyatakan oleh semua Negara Anggota di konferensi-konferensi ini.

Delapan komitmen kunci yang ditetapkan dalam Deklarasi Milenium menjadi **Tujuan Pembangunan Milenium (MDG)**:

1. Menghapus kemiskinan ekstrim dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar universal
3. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Penurunan angka kematian balita
5. Memperbaiki kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lain
7. Memastikan kelestarian lingkungan
8. Mengembangkan kemitraan global bagi pembangunan

MDG diikuti dengan 16 target global dan 48 indikator global. Tujuan, target dan indikator ini dimaksudkan agar bekerja bersama untuk mendorong tindakan yang efektif untuk mencapai pembangunan dan menghapus kemiskinan yang merupakan sasaran Deklarasi. Target-target dan indikator-indikator ini diciptakan untuk menjadi ukuran konkret sejauh mana negara-negara membuat kemajuan dalam mencapai Tujuan MDG, dan kemajuan ini dinilai secara teratur pada tingkat negara lewat laporan MDG nasional.

Pencapaian MDG telah menjadi prioritas utama bagi semua mitra pembangunan – pemerintah nasional, sistem PBB maupun lembaga-lembaga keuangan internasional. Kenyataan bahwa kebutuhan untuk mengatasi ketidak-setaraan gender telah ditekankan oleh Deklarasi Milenium, dan bahwa MDG secara jelas menyebutkan Tujuan kesetaraan gender dan pengakuan bahwa kesetaraan gender penting bagi pencapaian semua tujuan, menunjukkan bahwa MDG merupakan kesempatan yang berharga untuk pemajuan agenda kesetaraan gender.

Bagaimanapun, banyak pendukung hak asasi perempuan yang mencatat bahwa kesetaraan gender, sebagai keprihatinan lintas-silang untuk pencapaian semua MDG, tidak sepenuhnya tercermin dalam target-target dan indikator-indikator global.<sup>1</sup> Ada keprihatinan bahwa kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen yang lebih luas yang ada dalam CEDAW, BPFA (Beijing Platform for Action = Landasan Aksi Beijing) dan dokumen-dokumen yang disetujui secara global dan regional digambarkan dengan tidak baik. Tetapi para pendukung mengangkat tantangan ini dengan mencantumkan target-target dan indikator-indikator yang peka gender yang lebih luas cakupannya di tingkat nasional. Dan yang lebih penting – melebihi pertanyaan-pertanyaan tentang ukuran dan pelaporan – kalau ingin berhasil, jelaslah bahwa strategi-strategi aktual yang akan diadopsi untuk mencapai MDG harus memasukkan prakarsa kesetaraan gender. Sebagaimana ditekankan Laporan Pembangunan Manusia 2003 “kesetaraan gender adalah inti dari Tujuan-tujuan MDG yang akan dicapai – dari perbaikan kesehatan dan pemberantasan penyakit, ke pengurangan kemiskinan dan penanggulangan kelaparan, ke peningkatan pendidikan dan

---

1. Koalisi Perempuan Internasional untuk Keadilan Ekonomi, 2004

penurunan angka kematian balita, ke peningkatan akses pada air yang layak digunakan, sampai pemastian kelestarian lingkungan”.<sup>2</sup>

Penghapusan ketidak-setaraan dan ketidak-adilan gender dijamin dalam MDG, tetapi dalam kerangka global yang luas kepedulian akan kesetaraan gender muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Akankah MDG membawa masyarakat internasional berjalan mundur dalam memahami isu-isu kompleks yang harus dihadapi? Para pendukung kesetaraan gender telah bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen dalam CEDAW dan Beijing dipenuhi, dan hasilnya sekarang tampak jelas dalam bentuk hukum, ketentuan-ketentuan dalam konstitusi, keputusan-keputusan peradilan, kebijakan, tata pemerintahan dan alokasi sumberdaya yang peka gender. Akankah MDG mengalihkan perhatian dan komitmen dari proses-proses kesetaraan gender yang telah kita lakukan begitu lama agar efektif?

Kesempatan yang disediakan MDG dapat digunakan – tanpa menurunkan standar yang sudah ada dari analisis dan strategi-strategi kesetaraan gender dan tanpa melemahkan pengakuan dari proses kesetaraan gender global yang sudah terbentuk – kalau kita tetap teguh pada semangat Deklarasi Milenium. Upaya-upaya untuk mencapai MDG harus dipandu bukan hanya oleh tujuan-tujuan, target-target dan indikator-indikator global saja melainkan juga, yang paling penting, ialah pengakuan Deklarasi pada arti penting kesetaraan gender bagi semua kemajuan dalam pembangunan.

Karena itu, pendekatan yang diusulkan buku ini adalah MDG diperlakukan tidak sebagai agenda yang baru sama sekali tetapi merupakan wahana baru bagi **implementasi CEDAW dan Beijing**. Banyak yang dapat diraih dengan pendekatan CEDAW, Beijing dan MDG sebagai proses yang saling mendukung. Analisis yang komprehensif dan mendalam tentang cara beroperasinya ketidak-setaraan gender dalam setiap dimensi kehidupan perempuan telah diangkat lewat CEDAW dan Beijing, dan tersedia informasi tentang bagaimana bekerja untuk MDG. Strategi yang efektif untuk mencapai kesetaraan gender telah banyak dikembangkan selama beberapa dekade ini melalui upaya-upaya mengimplementasikan CEDAW dan Beijing, dan pendekatan-pendekatan ini telah terbukti dapat ditingkatkan dan digunakan dalam strategi-strategi untuk mencapai MDG. Pertanyaannya bukan sekedar apa yang bisa dikerjakan oleh CEDAW dan Beijing untuk mencapai MDG. Kalau komitmen dan sumberdaya yang saat ini dimobilisasikan untuk mencapai MDG dapat diarahkan untuk mendukung langkah-tindak yang telah kita ketahui dengan jelas perlu dilaksanakan berdasarkan CEDAW dan Beijing, maka kemajuan dalam implementasinya juga akan lebih berkembang.

Apabila kita yakin, maka pernyataan dalam Deklarasi Milenium dapat dijadikan pedoman untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.

---

2. UNDP, 2003

# LAPORAN MDG NASIONAL

Laporan MDG Nasional memetakan prioritas-prioritas dan pendekatan-pendekatan yang akan diadopsi oleh suatu negara bagi pencapaian setiap tujuan dari MDG. Sebagian besar negara yang telah berusaha untuk mencapai Tujuan MDG pada saat ini tengah mempersiapkan, atau mulai mempersiapkan, laporan-laporan ini. Proses ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi kerangka kerja global MDG untuk diselaraskan dengan keadaan masing-masing negara tetapi, sebagai bagian dari upaya ini, juga agar dimensi kesetaraan gender dari setiap Tujuan diberi perhatian yang selayaknya.

Sebagaimana akan dirinci dalam bagian 2, isu-isu kesetaraan gender yang muncul dalam setiap MDG secara integral dikaitkan dengan CEDAW dan Beijing – apa arti kesetaraan dan keadilan gender, dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya, tidak berubah dari kerangka-kerja yang satu dengan kerangka-kerja lainnya. Ini sangat memudahkan saat mengaitkannya dengan MDG, sehingga komitmen kerja yang telah dilakukan selama puluhan tahun oleh para pendukung kesetaraan dan keadilan gender untuk CEDAW dan Beijing dapat segera diterapkan. Beberapa langkah kunci termasuk hal-hal berikut ini:

- **Meminta masukan para ahli tentang CEDAW dan Beijing**

Penyusunan laporan MDG nasional harus melibatkan konsultasi yang luas dengan sektor-sektor yang relevan dalam masyarakat. Mencari ahli-ahli kesetaraan dan keadilan gender untuk memberikan masukan pada laporan harus dimulai dengan CEDAW dan Beijing. Dalam berbagai sektor pemerintahan dan dalam masyarakat madani ada kelompok-kelompok individu yang telah secara aktif terlibat dalam implementasi dan pemantauan CEDAW dan melaksanakan rencana aksi nasional Beijing.

- **Menggunakan CEDAW dan Beijing untuk analisis situasi**

Untuk setiap MDG, laporan dimulai dengan suatu analisis situasi untuk menilai seberapa jauh Tujuan MDG telah dicapai dan di mana tantangan-tantangan berikutnya berada. Banyak informasi mengenai kesetaraan gender tidak perlu dikumpulkan dari awal karena sudah ada dalam laporan-laporan pemerintah dan LSM yang telah diserahkan ke Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (bisa jadi juga sudah ada dalam persiapan pada saat menyusun draf laporan MDG). Sebagai tambahan, hasil-hasil survei dan laporan-laporan mengenai situasi kesetaraan gender pada tingkat nasional telah dipersiapkan untuk Beijing +5 dan Beijing +10. Semua laporan ini kaya akan rincian kualitatif dan informasi statistik tentang keadaan ketidak-setaraan gender di negara bersangkutan.

## **Titik Masuk Strategis: Menggunakan MDG Mewujudkan Kesetaraan Gender**

- **Membuat kerangka indikator nasional sesuai dengan prioritas CEDAW dan Beijing**

Target dan indikator global mungkin merupakan aspek terlemah dalam kerangka kerja MDG dari perspektif kesetaraan gender dan ini tentu dapat diperbaiki. Kedua hal ini dapat disesuaikan dan diperluas sesuai dengan konteks nasional dalam laporan MDG. Setiap indikator kesetaraan gender yang telah dikembangkan untuk mendukung implementasi Beijing dan CEDAW merupakan sumber yang sangat berguna. Juga, pada saat mengembangkan indikator baru, syarat-syarat dalam Beijing dan CEDAW adalah panduan yang baik untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut dirancang secara benar untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

- **Memperbaiki data-data statistik tentang isu-isu kesetaraan gender**

MDG sangat tergantung pada penggunaan data statistik. Target-target dan indikator-indikator dimaksudkan untuk dapat diukur secara statistik, menggunakan data yang dapat diperbandingkan lintas negara dan kawasan. Dalam hal di mana data statistik untuk isu-isu kritis kesetaraan gender sangat kurang, upaya-upaya nasional untuk mencapai MDG merupakan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. Tersedianya data baru dan data yang disempurnakan pada gilirannya akan mendukung semua upaya advokasi untuk memajukan kesetaraan dan keadilan gender di negara bersangkutan.

- **Mengidentifikasi langkah-tindak implementasi yang sesuai**

CEDAW dan Beijing dapat digunakan untuk mengidentifikasi langkah-tindak yang sangat dibutuhkan di masing-masing bidang dalam konteks negara yang berbeda pada setiap Tujuan MDG. Di banyak negara, sasaran strategis Beijing telah ditambah dengan rencana aksi nasional dan dilihat-kembali untuk Beijing +5 dan Beijing +10. Dalam CEDAW tidak hanya ada kewajiban bahwa semua pemerintah secara legal terikat untuk memenuhi tetapi juga langkah-langkah yang harus diambil pada tingkat negara untuk memenuhi persyaratan Konvensi yang dicantumkan dalam komentar akhir Komite CEDAW. Sebagai tambahan, Komite telah menyediakan panduan yang sangat rinci untuk banyak isu-isu kunci dalam Rekomendasi Umum, seperti kekerasan terhadap perempuan, kesehatan dan partisipasi politik. Semua sumber itu dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan langkah-tindak kesetaraan gender tertentu yang dapat diimplementasikan untuk mencapai masing-masing Tujuan MDG.

## **PEMANTAUAN: MENJAGA AGAR KESETARAAN DAN Keadilan Gender Tetap Menjadi Perhatian**

Penulisan draf laporan MDG nasional adalah langkah pertama dalam memulai proses pemantauan untuk memastikan tercapainya Tujuan-tujuan MDG, dan laporan-laporan ini secara periodik perlu dikaji kembali dan dimutakhirkan. Bagaimanapun, kenyataan bahwa ada dua proses pemantauan lain yang sudah mapan dan yang terus-menerus dilakukan sebagai komitmen pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan selama periode pencapaian Tujuan-tujuan MDG dan seterusnya, memberikan tambahan pada kesempatan strategis yang sangat kuat. Menggunakan proses pemantauan dan pengkajian CEDAW dan Beijing untuk melihat kemajuan, hambatan dan kegagalan dalam melakukan langkah-langkah pencapaian kesetaraan gender yang ditentukan dalam Tujuan-tujuan MDG, dapat membantu untuk memastikan bahwa komitmen nasional dan internasional pada dimensi gender dari Tujuan-tujuan MDG tidak surut.

- **Sesi-sesi Komite CEDAW**

Negara-negara Pihak Konvensi – 179 pada Oktober 2004 – harus memberikan laporan kepada Komite CEDAW setiap empat tahun. Selama sesi dua-kali-setahun itu, Komite menggunakan keahliannya untuk melihat-kembali laporan penilaian-sendiri yang dibuat pemerintah atas kemajuan dan tantangan dalam mencapai kesetaraan-gender, juga dari informasi alternatif (*'shadow report'*) tentang situasi negara yang disampaikan oleh organisasi non-pemerintah (ornop) perempuan. Setelah pengkajian, termasuk dialog dengan pemerintah, Komite memberikan komentar akhir, mengidentifikasi kelemahan terbesar yang ada dan bentuk tindakan yang sebaiknya diambil oleh pemerintah.

CEDAW mensyaratkan penghapusan diskriminasi dalam semua aspek kehidupan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Prakarsa kesetaraan gender yang telah – atau yang belum - diambil pemerintah untuk mencapai Tujuan-tujuan MDG, juga sejauh mana hal-hal ini mendapat dukungan sumberdaya kelembagaan dan keuangan agar menjadi efektif, merupakan pertimbangan yang relevan bagi Komite. Pada saat memberikan laporan kemajuan dalam mengimplementasikan Konvensi, Negara harus memasukkan informasi tentang langkah-tindak baru yang telah mulai digunakan dalam konteks MDG. Ornop-ornop perempuan dapat memberikan catatan tentang keberhasilan dan kesulitan agar mendapat perhatian Komite. Saran yang diberikan Komite untuk perbaikan prakarsa kesetaraan gender yang dijalankan lewat MDG, menjadi panduan yang dapat digunakan dalam proses pengkajian MDG.

- **Beijing +10**

Beijing +10, diselenggarakan sebagai sesi ke-49 dari Komisi Status Perempuan (28 Februari – 11 Maret 2005), merupakan kesempatan bagi penilaian kesetaraan gender oleh para pembuat keputusan tingkat-tinggi pemerintah. Ini termasuk melakukan kajian tentang kemajuan dalam pencapaian komitmen yang dibuat sehubungan dengan Beijing dan identifikasi tantangan yang ada dan strategi ke depan yang tepatguna.

Pada waktu persiapan, masing-masing pemerintah akan membuat penilaian-sendiri atas kemajuannya, berdasarkan kuesioner standar, dan organisasi masyarakat madani juga memiliki kesempatan untuk memberikan informasi alternatif tentang kemajuan dan hambatan-hambatan. Informasi yang tersedia tentang kemajuan di tingkat-negara akan dikonsolidasikan ke dalam laporan global yang akan diterbitkan oleh Sekretaris Jendral PBB.

Penilaian tentang kemajuan dan tantangan tersebut, juga hasil dari pertemuan persiapan regional Beijing +10, memberikan informasi dan rekomendasi-rekomendasi yang akan disetujui oleh delegasi-delegasi pemerintah. Rekomendasi-rekomendasi Beijing +10, pada gilirannya, dibawa ke Pertemuan Puncak Milenium +5 (diselenggarakan pada September 2005) untuk memberikan informasi dalam pembahasan mengenai jalan menuju pencapaian MDG.

Beijing +10 memberikan kesempatan untuk memperkuat dan memfokuskan dimensi-dimensi kesetaraan gender dalam upaya untuk mencapai MDG. Informasi mengenai rencana yang memadai untuk pemajuan kesetaraan gender lewat MDG, dan usulan-usulan untuk menggunakan langkah-tindak yang lebih efektif, perlu disampaikan agar mendapat perhatian para wakil pemerintah. Rekomendasi yang kuat mengenai kesetaraan gender dari Beijing +10 dan Pertemuan Puncak Milenium merupakan alat yang kuat untuk memberikan dorongan yang lebih kuat pada dilaksanakannya langkah-tindak untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

### **MENGARUSUTAMAKAN KESETARAAN GENDER**

Upaya-upaya untuk mencapai MDG meliputi cakupan yang luas dari sektor-sektor pemerintah, mitra pembangunan dan organisasi-organisasi masyarakat madani. Ini memberi kesempatan untuk memperbaiki koordinasi kepedulian atas kesetaraan gender dan menaikkannya ke tingkat kebijakan baru yang lebih tinggi. MDG akan membantu memperlancar dan memperkuat pemantauan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga sektoral dan kementerian dalam hubungannya dengan target-target dan indikator-indikator tertentu. Apabila pertimbangan-pertimbangan kesetaraan gender berhasil dimasukkan ke dalam upaya-upaya pencapaian Tujuan MDG, proses MDG akan membantu mengarus-utamakan gender dalam cakupan yang lebih luas dari program dan kebijakan nasional daripada yang dimungkinkan sebelumnya.

# Penghapusan Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrim

## **Target 1**

**Menurunkan hingga separoh jumlah orang yang hidup dengan penghasilan kurang dari satu dolar sehari**

## **Target 2**

**Menurunkan hingga separoh jumlah orang yang menderita kelaparan**

Suatu hambatan besar yang dihadapi oleh negara-negara yang berusaha keluar dari perangkap kemiskinan adalah kurangnya ketrampilan dan kemampuan manusia yang dibutuhkan untuk membuat transisi keluar dari kemiskinan, dan ketidak-setaraan gender adalah salah satu penyumbang terbesar pada masalah ini. Perpaduan dari penyingkiran banyak perempuan dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dari pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, dari angkatan kerja dan partisipasi pasar membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan ketrampilan yang sangat dibutuhkan oleh ekonomi mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Gugus Tugas Milenium tentang kemiskinan: 'salah satu hambatan terbesar untuk transisi modal manusia adalah pengingkaran hak asasi manusia yang mendasar pada sebagian besar penduduk dan umumnya yang terkena adalah perempuan.'

Akses perempuan pada aset produktif dan sumberdaya seringkali terbatas. Contohnya, mayoritas petani miskin adalah perempuan, tetapi di banyak negara mereka tidak punya hak legal untuk memiliki tanah atau aset yang akan membuat mereka bisa berinvestasi. Tambahan pula, kegagalan atau ketidak-bisaan pemerintah untuk memberikan infrastruktur sosial yang memadai akan memindahkan beban kerja pengasuhan pada perempuan dan anak-anak perempuan miskin – dan 'kemiskinan waktu' yang disebabkan oleh panjangnya jam kerja sehari-hari membatasi kesempatan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan penghasilan, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan memperoleh pendidikan.

Perempuan miskin di negara maju maupun sedang berkembang juga dapat dengan mudah terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan yang berdampak pada cara penyediaan pelayanan yang sangat dibutuhkan dan tuntutan pasar kerja, barang dan jasa.

Sehubungan dengan kelaparan dan khususnya kekurangan gizi, sangat penting untuk disadari bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk dapat mengatasinya, apabila kondisi sosial yang tidak setara dan praktek-praktek penyingkiran terus berlanjut sehingga mengingkari akses yang setara dari perempuan dan anak-anak perempuan pada pangan dan perawatan kesehatan. Memastikan otonomi dan pemberdayaan ekonomi perempuan sangat penting untuk melindungi kebutuhan gizi bagi mereka sendiri maupun anak-anak mereka.

#### **APA YANG DISYARATKAN CEDAW DAN BEIJING**

CEDAW dan Beijing mewajibkan pemerintah untuk melakukan langkah-tindak untuk menjamin hak-hak perempuan dan akses mereka pada sumber-sumber daya ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah harus memastikan kesetaraan gender dalam semua aspek ketenagakerjaan. Proses hukum, kebijakan dan administrasi harus menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam hubungannya dengan pemilikan, kontrak dan pinjaman – dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan juga dalam konteks perkawinan dan kehidupan keluarga. Perempuan harus memiliki akses pada pasar, kredit dan teknologi. Perhatian yang lebih besar harus diberikan kepada perempuan pedesaan, khususnya kesetaraan dalam hak atas pemilikan tanah harus dipastikan, juga kondisi hidup yang layak dalam hubungannya dengan perumahan, sanitasi dan pasokan air.

## **CEDAW**

- Menghapus diskriminasi terhadap perempuan untuk memastikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam lapangan kerja (pasal 11)
- Secara khusus, memastikan kesempatan yang sama dalam lapangan kerja, bebas memilih profesi, imbalan dan syarat pelayanan, pelatihan ketrampilan dan upah yang sama untuk kerja yang sama nilainya (pasal 11.b, 11.c, 11.d)
- Memastikan persamaan hak laki-laki dan perempuan di depan hukum, dan khususnya hak legal dan kemampuan yang sama dalam hubungannya dengan kontrak dan kepemilikan (pasal 15)
- Memastikan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam semua bidang ekonomi dan kehidupan sosial, dan khususnya hak yang sama pada pinjaman bank dan semua bentuk kredit keuangan (pasal 13.b)
- Memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, khususnya hak yang sama bagi kedua pasangan berkaitan dengan kepemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, menikmati dan memindah-tangankan harta benda (pasal 16.1.h)
- Memastikan perempuan pedesaan mendapat perlakuan yang sama dalam *land-reform* dan akses pada kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran dan teknologi (pasal 14.2.g)
- Memastikan perempuan pedesaan menikmati kondisi hidup yang layak, khususnya yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, listrik, air, transportasi dan komunikasi (pasal 14.2.h)

## **BPFA (LANDASAN AKSI BEIJING)**

- Merevisi praktek-praktek hukum dan administrasi untuk memastikan kesetaraan hak perempuan dan akses ke sumber daya ekonomi (sasaran strategis A.2)
- Memberi perempuan akses ke mekanisme tabungan dan kredit dan lembaga-lembaga (sasaran strategis A.3)
- Mengembangkan metodologi berbasis gender dan melakukan riset untuk mengatasi feminisasi kemiskinan (sasaran strategis A.4)
- Mempromosikan hak-hak ekonomi dan kemandirian perempuan, termasuk akses ke lapangan kerja, kondisi kerja yang layak dan kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi (sasaran strategis F.1)
- Memfasilitasi kesetaraan akses perempuan pada sumber-sumber daya, lapangan kerja, pasar dan perdagangan (sasaran strategis F.2)
- Menyediakan pelayanan bisnis, pelatihan dan akses ke pasar, informasi dan teknologi khususnya untuk perempuan berpenghasilan rendah (sasaran strategis F.3)
- Memperkuat kapasitas ekonomi dan jaringan komersial untuk perempuan (sasaran strategis F.4)
- Menghapus pembedaan pekerjaan dan semua bentuk diskriminasi pekerjaan (sasaran strategis F.5)
- Mempromosikan keharmonisan kerja dan tanggung jawab keluarga untuk perempuan dan laki-laki (sasaran strategis F.6)

# Mencapai Pendidikan Dasar Universal

## Target 3

**Memastikan bahwa semua anak laki-laki dan perempuan memperoleh pendidikan dasar lengkap**

Tujuan pendidikan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak perempuan dan laki-laki memperoleh pendidikan dasar lengkap. Meskipun ada gerakan yang jelas menuju pencapaian kesetaraan gender dalam pendidikan selama beberapa dasawarsa ini, namun secara global masih belum terjangkau – dari 150 juta anak-anak umur 6-11 tahun yang saat ini tidak bersekolah, lebih dari 90 juta adalah anak perempuan<sup>4</sup> – dan di beberapa kawasan anak perempuan yang mengikuti pendidikan dasar masih di bawah 60%.

Hambatan-hambatan ekonomi, sosial dan budaya harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, termasuk tuntutan bagi anak-anak perempuan untuk bekerja di rumah dan di pertanian, juga kenyataan maupun persepsi bahwa kelak bila dewasa akan terbatasnya kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan pendapatan mereka. Perlu dilaksanakannya langkah-tindak yang peka pada hambatan-hambatan khusus yang menghalangi akses anak-anak perempuan untuk mendapat pendidikan. Pengurangan biaya sekolah (seperti iuran sekolah, pakaian seragam dan buku-buku) telah terbukti memberikan dampak yang menguntungkan pada partisipasi sekolah anak-anak perempuan, disertai dengan penanganan keprihatinan orangtua tentang kesopanan dan keselamatan selama pelatihan dan mempekerjakan lebih banyak guru perempuan serta memperbaiki akses pada fasilitas kebersihan. Kemungkinan terjadinya kekerasan berbasis gender baik di lingkungan sekolah maupun dalam perjalanan ke dan dari sekolah, harus ditangani sebagai hal yang mendesak.

---

4. Bank Dunia Kelompok Gender dan Pembangunan, 2003: 11

## APA YANG DISYARATKAN OLEH CEDAW DAN BEIJING

CEDAW dan komitmen Beijing mewajibkan pemerintah untuk memastikan kesetaraan gender di semua tingkat pendidikan – pendidikan dasar, menengah dan universitas, maupun pelatihan teknik, pendidikan lanjutan dan program pemberantasan buta aksara. Ini melibatkan tidak hanya penyediaan kesempatan yang sama untuk masuk sekolah, tetapi juga melaksanakan langkah-tindak yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak perempuan dan perempuan dewasa dibantu untuk dapat menyelesaikan pendidikan mereka atas dasar persamaan dengan anak laki-laki dan laki-laki dewasa. Para pemerintah harus menghilangkan hambatan-hambatan khusus yang menghalangi anak-anak perempuan dan perempuan dewasa untuk mendapat pendidikan dan mengembangkan berbagai pendekatan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## **CEDAW**

- Menghapus diskriminasi terhadap perempuan untuk memastikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan (pasal 10)
- Secara khusus, memastikan kesetaraan dalam akses untuk belajar dan mendapat ijazah di semua tingkat pendidikan, di daerah pedesaan maupun perkotaan, akses pada pendidikan dengan standar yang sama; dihapusnya stereotip dalam pendidikan; kesempatan yang sama untuk mendapat beasiswa dan hibah; kesetaraan dalam akses pada pendidikan lanjutan dan program pemberantasan buta aksara; dan mengurangi angka putus sekolah pelajar perempuan serta menyelenggarakan program-program untuk anak-anak perempuan dan perempuan dewasa yang berhenti sekolah sebelum tamat (pasal 10.a, b, c, d, e dan f)
- Memastikan hak perempuan pedesaan untuk memperoleh semua jenis pelatihan dan pendidikan (pasal 14.2.d)
- Melaksanakan semua langkah-tindak legislasi dan langkah-tindak lainnya yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap kekerasan berbasis gender (Rekomendasi Umum#19)

## **BPFA**

- Memastikan adanya kesetaraan dalam akses pada pendidikan (sasaran strategis B.1)
- Menghapus diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dalam pendidikan, pengembangan ketrampilan dan pelatihan (sasaran strategis L.4)
- Mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang tidak diskriminatif (sasaran strategis B.4)
- Mengalokasikan sumberdaya yang cukup untuk memantau implementasi reformasi pendidikan (sasaran strategis B.5)
- Menghapus kekerasan terhadap anak-anak perempuan (sasaran strategis L.7)

# Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

## **Target 4: Menghapus ketimpangan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, pada tahun 2005, dan di semua tingkat pendidikan tidak lewat dari 2015**

Semua cakupan langkah-tindak yang harus dilaksanakan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah dipetakan secara komprehensif dalam CEDAW dan BPFA, juga dalam ketetapan-ketetapan kunci instrumen-instrumen internasional dan dokumen-dokumen konferensi lain.<sup>5</sup> Pengarahan yang ditujukan pada pemerintah dalam dokumen-dokumen ini memperhatikan dimensi-dimensi yang paling kritis dari ketidak-setaraan gender dalam semua aspek kehidupan perempuan – termasuk dalam hubungannya dengan kekerasan berbasis gender, stereotip budaya, trafiking dan pelacuran, konflik bersenjata, kehidupan politik, peraturan perundang-undangan dan status hukum, tata pemerintahan, media, pendidikan, lapangan kerja, perawatan kesehatan, keluarga berencana, kemiskinan, lingkungan, kehidupan pedesaan, serta hubungan perkawinan dan kekeluargaan. Karena MDG sebenarnya dirumuskan sebagai sarana untuk mempercepat dan mengintensifkan-kembali upaya-upaya untuk memenuhi komitmen global, dan Deklarasi Milenium secara khusus bertekad untuk meningkatkan implementasi CEDAW, tuntutan yang paling mendesak untuk dilakukan dalam Tujuan 3 MDG adalah untuk mengimplementasikan CEDAW dan Beijing secara luas.

---

5. Ini termasuk: Konferensi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (1992), Konferensi Wina tentang Hak Asasi Manusia (1993), Konferensi Kairo tentang Kependudukan dan Pembangunan (1994), Pertemuan Puncak Dunia Kopenhagen tentang Pembangunan Sosial (1995), Konferensi Istanbul tentang Pemukiman Manusia (1996), Konferensi Durban Menentang Rasisme (2001), Konferensi Monterrey tentang Pembiayaan Pembangunan (2002)

Dalam konteks MDG, sangat penting untuk melaksanakan dengan aktif program yang komprehensif – bukannya sepotong-sepotong – untuk memajukan kesetaraan gender. Isu-isu kesetaraan gender yang membutuhkan penanganan segera yang ada dalam berbagai Tujuan MDG tidak dapat ditangani secara efektif kecuali dilakukan dari berbagai sisi. Contohnya, upaya untuk meningkatkan penghasilan perempuan tidak dapat hanya difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkenaan dengan tempat kerja dan pasar semata, namun juga harus ditangani segala masalah-masalah yang mendasari ketidak-setaraan gender dalam pendidikan perempuan, kapasitas legal, paparan pada kekerasan berbasis gender, stereotip budaya dan pembagian kerja berdasar gender dalam keluarga, juga isu-isu yang lebih luas dari kebijakan makro-ekonomi dan distribusi sumberdaya global. Perpaduan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi CEDAW dan Beijing di semua dimensi adalah jaminan yang terbaik sehingga, pada saat tahun 2015 tiba, situasi akan sangat berubah untuk perempuan dan kemajuan yang signifikan akan dicapai tidak hanya pada Tujuan 3 MDG tetapi juga pada semua Tujuan.

### **APA YANG DISYARATKAN OLEH CEDAW DAN BEIJING**

Sebagai tambahan untuk advokasi peningkatan upaya implementasi semua ketentuan CEDAW dan Beijing, perhatian harus juga diarahkan pada ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan penciptaan infrastruktur dan lingkungan yang memungkinkan realisasi hak asasi perempuan. Bila dasar kerja ini tidak dibangun, maka upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan gender akan menghadapi hambatan. Yang perlu mendapat catatan khusus adalah kebutuhan untuk mengkaji dan melakukan perubahan konstitusi dan perundang-undangan, dan pembentukan tatanan dan proses yang tepatguna dalam pemerintahan – termasuk penciptaan dan penguatan kelembagaan perempuan. Lagi pula, banyak pemerintah telah menunjukkan kemauan yang tinggi untuk mulai menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan struktur yang perlu, namun pengakuan bahwa perubahan-perubahan ini harus didukung dan didanai secukupnya supaya efektif seringkali masih kurang memadai.

## **CEDAW**

- Mencantumkan azas persamaan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi nasional (pasal 2.a)
- Menghapus undang-undang, peraturan, kebiasaan dan praktek yang ada, yang mendiskriminasi perempuan (pasal 2.f)
- Mengadopsi langkah-langkah legislasi untuk melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan memastikan bahwa perempuan mempunyai akses pada perlindungan terhadap tindakan diskriminasi melalui peradilan nasional dan lembaga-lembaga publik lainnya (pasal 2.b dan c)
- Membentuk dan/atau memperkuat mekanisme nasional yang efektif, didukung dengan pengarus-utamaan gender di semua lembaga pemerintah, untuk memberikan pertimbangan tentang dampak semua kebijakan pemerintah pada perempuan, memantau situasi perempuan secara komprehensif dan membantu merumuskan kebijakan-kebijakan baru serta dengan efektif melaksanakan strategi dan langkah-tindak untuk menghapus diskriminasi (Rekomendasi Umum #6)

## **BPFA**

- Memastikan adanya persamaan dan non-diskriminasi berdasarkan hukum dan dalam praktek (sasaran strategis 1.2)
- Mengintegrasikan perspektif gender dalam perundang-undangan, kebijakan publik, program-program dan proyek-proyek (sasaran strategis H.2)
- Mengumpulkan dan menyebarluaskan data terpilah laki-laki dan perempuan serta informasi untuk perencanaan dan evaluasi (sasaran strategis H.3)
- Menciptakan atau memperkuat mekanisme kelembagaan nasional dan badan-badan pemerintah lainnya (sasaran strategis H.1)

# Menurunkan Angka Kematian Anak

## Meningkatkan Kesehatan Ibu

### **Target 4**

**Menurunkan angka kematian anak balita sampai dua-per-tiga**

### **Target 5**

**Menurunkan rasio angka kematian ibu sampai tiga-per-empat**

*CEDAW dan Beijing memahami diskriminasi berbasis gender sebagai ancaman pada kesehatan perempuan sekaligus anak-anak mereka, dan oleh karena itu Tujuan 4 dan 5 ditangani secara bersamaan*

Sebagaimana telah dicatat oleh Gugus Tugas Milenium untuk kesehatan anak dan ibu, tantangan untuk mencapai Tujuan-tujuan ini bukan secara teknologis tetapi lebih pada masalah cara penyampaian. Tata sosial yang dibutuhkan agar secara efektif dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai belum ada saat ini – karena alasan akhirnya lebih banyak merupakan pertimbangan politis seperti kekurangan dana dan buruknya sistem pelayanan kesehatan sebagai akibat dari reformasi ekonomi.

Untuk perempuan dan anak-anak mereka, serangkaian ketidak-setaraan gender yang telah berurat-akar dalam tatanan sosial, ekonomi, budaya dan politik membuat keadaan tersebut semakin merupakan ancaman. Perempuan yang tersingkir dari kesempatan pendidikan dan baca-tulis secara signifikan kurang kemampuannya untuk merawat kesehatan diri-sendiri dan anak-anak mereka dan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Di beberapa kawasan, tingginya angka kematian anak perempuan berhubungan dengan rendahnya nilai budaya anak perempuan dan diberikannya gizi dan perawatan kesehatan yang lebih baik untuk anak laki-laki. Sementara banyak indikator kesehatan telah diperbaiki selama beberapa dasawarsa terakhir, namun angka kematian ibu melahirkan sangat sedikit berubah. Ini tidak hanya karena kurangnya tenaga medis yang terlatih maupun rumah bersalin, tetapi juga karena akses perempuan pada pelayanan yang ada terhambat oleh kurangnya kontrol mereka atas sumberdaya rumah-tangga, kurangnya kekuatan dalam membuat keputusan dan terbatasnya kebebasan mereka untuk bergerak di luar rumah.

Gugus Tugas Milenium untuk kesetaraan gender telah menyarankan bahwa, di sektor kesehatan, 'negara-negara harus memprioritaskan kebijakan yang mempromosikan akses universal pada pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana, aborsi aman, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual, dan intervensi gizi, juga kebijakan yang membuat perempuan bisa melahirkan secara aman dengan memastikan bahwa semua kelahiran didampingi oleh petugas kesehatan yang cukup terlatih dan bahwa semua perempuan mempunyai akses pada fasilitas kesehatan yang menyediakan perawatan kebidanan darurat dalam keadaan komplikasi kebidanan yang mengancam-jawa.<sup>6</sup>

### **APA YANG DISYARATKAN CEDAW DAN BEIJING**

Para pemerintah diwajibkan oleh CEDAW dan komitmen Beijing untuk melembagakan serangkaian langkah-tindak yang berhubungan dengan perawatan kesehatan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat manfaat secara setara. Apabila kebutuhan akan perawatan kesehatan dari kedua jenis kelamin sama, kesetaraan akses harus dipastikan. Tetapi bila perempuan memiliki kebutuhan, peran dan tanggung-jawab yang berbeda – terutama dalam hubungannya dengan kehamilan, keluarga berencana dan gizi dan kesejahteraan keluarga – pemerintah harus mengambil langkah-tindak tambahan yang perlu untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini juga terpenuhi. Lebih jauh, sementara tujuan kesehatan ibu dan penurunan angka kematian anak secara langsung berkaitan dengan kewajiban CEDAW dan Beijing sehubungan dengan penyediaan pelayanan kesehatan, jaminan kesetaraan gender dalam bidang-bidang lain juga penting diimplementasikan untuk memastikan bahwa perempuan cukup berdaya agar dapat memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang tersedia.

6. Gugus Tugas Milenium untuk Pendidikan dan Kesetaraan Gender, 2004: 33.

## **CEDAW**

- Menghapus diskriminasi di bidang perawatan kesehatan, untuk memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pelayanan perawatan-kesehatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan keluarga berencana (pasal 12.1)
- Memastikan pelayanan yang layak bagi perempuan dalam kaitannya dengan kehamilan, persalinan dan periode pasca-persalinan, bila perlu menyediakan pelayanan gratis (pasal 12.2)
- Memastikan perempuan mendapat gizi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui (pasal 12.2)
- Memastikan hak perempuan pedesaan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan-kesehatan yang memadai, termasuk informasi, konseling dan pelayanan keluarga berencana (pasal 14.2.b)
- Menghapus diskriminasi dalam pendidikan untuk memastikan akses perempuan pada informasi pendidikan untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk informasi dan nasehat tentang keluarga berencana (pasal 10.h)

## **BPFA**

- Meningkatkan akses perempuan sepanjang siklus kehidupannya pada pelayanan kesehatan, informasi dan pelayanan-pelayanan terkait lainnya yang layak, dengan biaya terjangkau dan berkualitas (sasaran strategis C.1)
- Memperkuat program pencegahan yang mempromosikan kesehatan perempuan (sasaran strategis C.2)
- Melakukan prakarsa peka-gender dalam menangani penyakit menular seksual, HIV/AIDS dan isu-isu kesehatan seksual dan reproduksi (sasaran strategis C.3)
- Mempromosikan riset dan penyebaran informasi tentang kesehatan perempuan (sasaran strategis C.4)
- Meningkatkan sumberdaya dan memantau tindak-lanjut untuk kesehatan perempuan (sasaran strategis C.5)
- Menghapus diskriminasi terhadap anak perempuan dalam kesehatan dan gizi (sasaran strategis L.5)

# Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lain

## **Target 7**

**Menghentikan dan menanggulangi persebaran HIV/AIDS**

## **Target 8**

**Menghentikan dan menanggulangi berjangkitnya malaria dan penyakit-penyakit lain**

Sekarang sudah diakui secara luas bahwa ketidak-setaraan gender merupakan salah satu faktor utama tersebarnya wabah HIV/AIDS. Menghentikan persebaran HIV/AIDS tergantung pada keberhasilan upaya untuk dapat menghilangkan serangkaian ketidak-setaraan gender yang telah mengakar dan saling berkaitan, yang secara berbarengan menyebabkan terutama perempuan sangat rentan pada penyakit ini. Norma-norma sosial yang mengacuhkan pengetahuan tentang seks dan kemurnian perempuan, menghalangi akses mereka pada informasi tentang pencegahan. Ketidak-seimbangan kuasa gender membuat sulit bagi perempuan untuk menegosiasi dengan pasangannya tentang praktek-praktek seksual yang aman, dan ketergantungan ekonomi serta ketakutan pada kekerasan dapat secara efektif memaksa mereka untuk menyetujui seks tidak aman. Perempuan menerima perawatan dan pengobatan yang tidak memadai karena memang disembunyikan dari mereka dan karena perawatan yang disediakan tidak dapat diakses dan tidak cocok untuk kebutuhan kesehatan mereka. Beban untuk mengasuh orang-orang yang bergantung pada mereka dan untuk merawat diri-sendiri telah berlebihan, sehingga menjerumuskan keluarga ke dalam kemiskinan dan kemelaratan, karena perempuan tidak punya akses pada sumberdaya ekonomi dan merupakan yang paling parah terkena oleh kurangnya dukungan sosial yang mereka butuhkan. Strategi-strategi untuk merespon krisis HIV/AIDS secara konsisten gagal memasukkan perspektif gender, terutama karena perempuan tidak ditempatkan di garis depan dalam rumusan kebijakan HIV/AIDS.

## **APA YANG DISYARATKAN OLEH CEDAW DAN BEIJING**

Serangkaian ketentuan CEDAW dan Beijing dapat diterapkan dalam upaya untuk merespon wabah HIV/AIDS, sebagai tambahan pada ketentuan khusus yang berhubungan dengan perawatan kesehatan. Karena ketidak-setaraan gender dan HIV/AIDS sangat berkaitan di berbagai tingkatan yang berbeda, tantangan untuk menghentikan persebaran wabah itu memerlukan implementasi dari berbagai ketentuan pada saat yang sama. Langkah-langkah harus diambil dalam bidang kesetaraan ekonomi dan pemberdayaan perempuan, kesetaraan dalam hubungan perkawinan dan keluarga, perawatan kesehatan, penghapusan kekerasan berbasis gender, perubahan stereotipe budaya berbasis gender dan peningkatan partisipasi politik perempuan.

## **CEDAW**

- Menghapus peran stereotip sosial dan budaya dan praktek-praktek berdasarkan ketidaksetaraan gender (pasal 5.a)
- Menghapus semua bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (Rekomendasi Umum #19)
- Menghapus diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin hak yang sama laki-laki dan perempuan dalam lapangan kerja (pasal 11)
- Menjamin hak yang sama laki-laki dan perempuan sehubungan dengan kontrak dan kepemilikan (pasal 15)
- Memastikan persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga (pasal 16)
- Menjamin akses yang sama bagi perempuan pada pelayanan perawatan kesehatan (pasal 12.1)
- Tiadakan diskriminasi terhadap perempuan dalam strategi nasional untuk pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS (Rekomendasi Umum #15)
- Memastikan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah serta memegang jabatan publik dan fungsi-fungsi publik di semua tingkatan pemerintah (pasal 7.b)<sup>7</sup>

7. Untuk analisis yang lebih detil dari cara-cara CEDAW diaplikasikan pada dimensi-dimensi gender yang berbeda tentang wabah HIV/AIDS, lihat UNIFEM, *Turning the Tide*, 2001

## **BPFA**

Menghapus pola tingkah laku dan praktek-praktek budaya yang merugikan anak perempuan (sasaran strategis L.2)

- Melakukan langkah-tindak terpadu untuk mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan (sasaran strategis D.1)
- Mempromosikan hak ekonomi dan kemandirian perempuan, termasuk akses pada lapangan kerja, kondisi kerja yang layak dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi (sasaran strategis F.1)
- Meningkatkan akses perempuan sepanjang siklus hidup pada perawatan kesehatan yang tepat-guna, layak dan berkualitas, dengan biaya terjangkau dan informasi dan pelayanan yang relevan (sasaran strategis C.1)
- Mengambil prakarsa peka-gender untuk menangani penyakit menular seksual, HIV/AIDS dan isu-isu kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi (sasaran strategis C.3)
- Melaksanakan langkah-tindak untuk memastikan akses setara bagi perempuan pada dan partisipasi penuh dalam tata kekuasaan dan pengambilan keputusan (sasaran strategis G.1)

# Memastikan Kelestarian Lingkungan

## **Target 9**

**Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program negara dan memulihkan sumberdaya lingkungan yang hilang**

## **Target 10**

**Mengurangi sampai setengah proporsi orang yang tidak mempunyai akses berkelanjutan pada air yang layak minum**

## **Target 11**

**Mencapai perbaikan yang signifikan dalam kehidupan paling sedikit 100 juta penghuni daerah kumuh pada tahun 2020**

Karena pembagian kerja berdasarkan gender, perempuan di banyak bagian dunia memikul tanggung-jawab utama untuk pekerjaan pertanian, pengumpulan air dan bahan bakar dan penyediaan pangan untuk keluarga mereka. Kerusakan lingkungan dan kurangnya akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam mengakibatkan dampak yang parah pada perempuan. Contohnya, karena kekuatan-kekuatan yang mengurangi akses pada pasokan air bersih – polusi, privatisasi jasa air, pelayanan yang buruk dan peningkatan tekanan jumlah penduduk – beban pada perempuan telah meningkat secara dramatis. Perempuan dan anak-anak miskin (lebih sering anak perempuan) menempuh perjalanan jauh dari rumah untuk mencari sumber air, yang membuat mereka terpapar pada kekerasan, memperpanjang hari kerja yang sudah panjang dan membatasi waktu mereka untuk bercocok tanam pangan dan meningkatkan penghasilan. Anak-anak perempuan mungkin dipaksa berhenti sekolah untuk membantu mengambil air. Dan kemungkinan lain banyak perempuan yang sudah kelebihan beban terpaksa menggunakan air dengan kualitas rendah, sering air tanah yang

terkontaminasi yang tidak layak dikonsumsi, yang mengancam kesehatan keluarga mereka. Lebih jauh, di mana HIV/AIDS memasuki rumah tangga, kurangnya akses pada air bersih yang diperlukan untuk merawat anggota keluarga dapat sepenuhnya menguras kapasitas perempuan sebagai pemberi pengasuhan dan mempercepat kematian orang yang terinfeksi penyakit itu.

Melalui tanggungjawab mereka berkaitan dengan sumberdaya utama lingkungan, perempuan telah mengembangkan pengetahuan yang berharga tentang pelestarian lingkungan dan memainkan peran sentral dalam kehidupan lingkungan mereka. Bagaimanapun, ketidak-setaraan gender dan diskriminasi telah menghalangi perempuan dari kekuasaan untuk mengambil keputusan guna mengambil langkah-langkah yang akan membantu pencapaian Tujuan 7. Di negara-negara di mana hak perempuan untuk memiliki tanah tidak dijamin, misalnya, perempuan secara efektif diingkari aksesnya untuk mendapat informasi, teknologi dan sumberdaya yang akan membisakan mereka untuk lebih terlibat dengan praktek-praktek pelestarian lingkungan. Sebagaimana dicatat Gugus Tugas Milenium "bila perempuan tidak memiliki pengetahuan, sarana atau kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di mana mereka secara langsung menggantungkan hidupnya, kerusakan sumberdaya ini kemungkinan besar akan terjadi."<sup>7</sup> Dan kurangnya kontrol langsung atas sumberdaya ini tercermin pada pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi, di mana perempuan dan perspektif mereka terus-menerus hilang dari semua aspek perumusan kebijakan dan pengambilan-keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, konservasi dan pemantauan.

#### **APA YANG DISYARATKAN CEDAW DAN BEIJING**

Dalam CEDAW dan Beijing, para pemerintah harus memastikan bahwa perempuan – terutama perempuan pedesaan – berpartisipasi dalam semua tingkat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, dan bahwa keprihatinan dan perspektif perempuan tercermin dengan baik dalam semua kebijakan dan pendekatan yang diadopsi. Lebih lanjut, pemerintah harus memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan kontrol pada sumberdaya-kunci lingkungan tertentu, seperti air dan tanah, yang dibutuhkan baik untuk melindungi perempuan dari dampak kerusakan lingkungan maupun untuk membisakan mereka mengambil langkah-tindak yang dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan.

7. Gugus Tugas Milenium untuk Kelestarian Lingkungan, 2004: 16.

## **CEDAW**

- Memperhitungkan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan peran penting yang dimainkan perempuan pedesaan dalam klangsungan kehidupan ekonomi keluarga mereka (pasal 14.1)
- Memastikan hak perempuan pedesaan untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implemen-tasi perencanaan pembangunan di semua tingkat (pasal 14.2.a)
- Memastikan bahwa perempuan pedesaan mempunyai akses pada kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan yang sama dalam *landreform* agraria juga dalam skema tanah untuk pemukiman kembali (pasal 14.2.g)
- Memastikan bahwa perempuan pedesaan menikmati kondisi hidup yang layak, terutama berkenaan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi (pasal 14.2.h)

## **BPFA**

- Melibatkan perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan di semua tingkatan (sasaran strategis K.1)
- Mengintegrasikan keprihatinan dan perspektif gender dalam kebijakan dan program-program untuk pembangunan yang berkelanjutan (sasaran strategis K.2)
- Memperkuat atau membentuk mekanisme di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mengkaji dampak pembangunan dan kebijakan lingkungan pada perempuan (sasran strategis K.3)

# Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

## Target 12

**Mengembangkan sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, berdasarkan peraturan, dapat diperkirakan dan non diskriminatif**

## Target 17

**Bekerjasama dengan perusahaan farmasi, menyediakan akses pada obat yang penting dengan harga terjangkau di negara-negara berkembang**

## Target 18

**Bekerjasama dengan sektor swasta, menyediakan manfaat teknologi baru terutama teknologi informasi dan komunikasi**

Pencantuman suatu tujuan bagi pembangunan kemitraan global harus mengarahkan perhatian semua mitra pembangunan pada lingkungan ekonomi dan politik yang lebih luas di negara-negara yang sedang berjuang untuk mencapai MDG. Kecuali bila semua pihak yang memiliki pengaruh global – termasuk para pemerintah yang duduk di lembaga keuangan dan perdagangan internasional, donor dan sistem PBB, juga sektor swasta – aktif terlibat dalam menjamin lingkungan yang memungkinkan tercapainya MDG, kelangsungan seluruh kegiatan akan terancam. Tak dapat dihindarkan bahwa, apapun komitmen nasional para pemerintah yang mengimplementasikan perubahan yang dimandatkan oleh MDG, Tujuan-tujuan ini akan tetap tidak tercapai bila tidak tersedia sumberdaya yang dibutuhkan dan keluwesan pembuat kebijakan.

Perlu diperhatikan secara khusus kemungkinan ketidak-sesuaian antara strategi yang dibutuhkan untuk mencapai MDG dan kerangka kebijakan ekonomi dan perdagangan di tingkat nasional dan global, misalnya strategi pengurangan kemiskinan. Contohnya, bila keputusan yang diambil di tingkat nasional dan global dalam hubungannya dengan subsidi yang secara efektif merugikan produk pertanian perempuan miskin, mempromosikan skema swastanisasi sehingga harga air di luar jangkauan perempuan miskin atau Bantuan Pembangunan Luar Negeri (ODA) yang tersedia untuk kerjasama pembangunan mengerut, maka upaya terbaik di tingkat nasional pun tidak akan memadai untuk mencapai MDG.

Juga harus ditekankan bahwa, selain daripada tanggungjawab mereka berkaitan dengan MDG, para pemerintah wajib mempromosikan hak asasi perempuan dan menghapus segala bentuk ketidak-setaraan gender yang telah dinyatakan dalam dokumen ini. Untuk alasan ini juga, posisi ekonomi dan politik yang lebih luas yang mereka ajukan dalam forum-forum internasional harus selalu memfasilitasi terwujudnya hak asasi perempuan, dan bukan sebagai hambatan. Kepemimpinan perempuan dan pencantuman perspektif hak asasi perempuan di tingkat internasional sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang benar sudah diambil.

## **APA YANG DISYARATKAN OLEH CEDAW DAN BEIJING**

Para ahli hak asasi manusia telah meningkatkan perhatiannya pada tanggungjawab yang dimiliki lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional menurut standar hak asasi manusia seperti CEDAW. Di antara hal-hal ini, ditunjukkan bahwa para pemerintah tidak hanya mempunyai kewajiban terhadap warga negaranya sendiri sehubungan dengan pakta hak asasi manusia. Para pemerintah yang memiliki hak suara dalam dan menyediakan dana untuk lembaga-lembaga keuangan internasional wajib menghormati komitmen hak asasi manusia dalam konteks ini juga. Beijing juga secara jelas mendorong para pemerintah untuk memperhatikan pertimbangan kesetaraan gender dalam kegiatan-kegiatan mereka di tingkat internasional. Sebagai tambahan, baik CEDAW maupun Beijing menetapkan ketentuan-ketentuan yang kuat yang menuntut dilaksanakannya langkah-tindak untuk memastikan bahwa perempuan, dan perspektif perempuan, memainkan peran sentral dalam pengambilan-keputusan politik di semua tingkatan.

## **CEDAW**

- Menjamin adanya kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintah mereka di tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam kerja organisasi-organisasi internasional (pasal 8)
- Memastikan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah dan untuk memangku jabatan publik serta mengemban fungsi publik di semua tingkatan pemerintahan (pasal 7.b)
- Memastikan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berhubungan dengan kehidupan publik dan politik negara (pasal 7.c)
- Memastikan hak perempuan pedesaan untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di semua tingkatan (pasal 14.2.a)

## **BPFA**

- Menelaah, mengadopsi dan mempertahankan kebijakan-kebijakan makroekonomi dan strategi-strategi pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan upaya perempuan yang hidup dalam kemiskinan (sasaran strategis A.1)
- Melaksanakan langkah-tindak untuk menjamin akses perempuan yang setara untuk berpartisipasi penuh dalam tata kekuasaan dan pengambilan-keputusan (sasaran strategis G.1)